

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

NOMOR : 1158/D6.2/KP/2017

TENTANG PENETAPAN / PENGESAHAN
TENAGA AHLI PADA SUBDIT KURIKULUM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

- Menimbang :
- a. Bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Subdit Kurikulum memerlukan peningkatan kualitas hasil pekerjaan dalam bidang Kejuruan/Vokasi .
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas pimpinan Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, perlu diadakan Tenaga Ahli Bidang Kejuruan/Vokasi
 - c. Bahwa berdasarkan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Tenaga Ahli yang dimaksud.
- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor : 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0001/D6/KU/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.
- Memperhatikan :
- a. Pengumuman Kebutuhan Tenaga Ahli LPSE Nomor 0942/D6.05/TU/2017 Tanggal, 5 Mei 2017
 - b. Hasil Penilaian Oleh Tim Penilai atas berkas lamaran Tenaga Ahli Bidang Kejuruan/Vokasi pada Subdit Kurikulum Tahun 2017.
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen Nomor : 023.03.1.666.028/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan perubahannya.

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Dr. Edhy Susatya, Dip. Ed. lahir di Sleman pada tanggal 2 Februari 1961, sebagai Tenaga Ahli Bidang Kejuruan/Vokasi Pada Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud.
- Kedua : Tugas Tenaga Ahli, secara lebih lengkap diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- Ketiga : Waktu tugas tenaga ahli selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan terhadap Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Jakarta tanggal: 31 Mei 2017

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan PK dan LK



Snap

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen;
2. Kasubdit Dilingkungan Dit. PPK-LK;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. PPK-LK;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pada Subdit yang bersangkutan;
5. Yang bersangkutan

Dr. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP 19600709 1985032001

Lampiran 1 Surat Direktur Pembinaan PK-LK
Nomor : 1158 /D6.2/KP/2017
Tanggal : 31 Mei 2017

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI SUBDIT KURIKULUM

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Edhy Susatya, Dip. Ed	Tenaga Ahli Bidang Kejuruan/Vokasi



Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan PK dan LK

Sri Renani

Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP 196007091985032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12420
Telepon 021 7693260 s.d. 7963266 Faksimile 7657156
website:www.pkplk-plb.org email: ppklk.dikdas@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor :0942/D6.05/TU/2017

Tanggal : 5 Mei 2017

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana prasarana akan merekrut Tenaga Ahli Kelembagaan dan Subdit Kurikulum akan merekrut Tenaga Ahli bidang Kejuruan/Vokasi serta Tenaga Ahli Penilaian Hasil Belajar dengan rincian :

No	Tenaga	Jumlah	Persyaratan/Kualifikasi Khusus	Masa Kerja
1	Tenaga Ahli Kelembagaan	1 orang	<ul style="list-style-type: none">• Berpengalaman sebagai tenaga ahli/konsultan di bidang kelembagaan• Jenjang Pendidikan minimal S-2• Usia maksimal 55th di tahun 2017• Latar belakang pendidikan hukum atau manajemen pendidikan• Mampu mengoperasikan komputer minimal microsoft office• Diutamakan yang punya pengalaman di Bidang Pendidikan Khusus atau Layanan Khusus (PKLK)	8 (delapan) bulan
2	Tenaga Ahli di bidang Kejuruan/Vokasi	1 orang	<ul style="list-style-type: none">• Pria/Wanita• Usia maksimal 60th• Pendidikan S2 bidang Teknologi dan Kejuruan• Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan kejuruan• Menguasai TIK dengan baik	8 (delapan) bulan
3	Ahli Penilaian Hasil Belajar	2 orang	<ul style="list-style-type: none">• Pria/Wanita• Usia maksimal 50th• Pendidikan S1 (Sarjana)• Menguasai dan berpengalaman di bidang TIK	8 (delapan) bulan

Persyaratan Umum :

1. Bersedia bekerja penuh waktu (8 jam) per hari di Direktorat Pembinaan PKLK
2. Sanggup bekerja melebihi jam kerja (over time)
3. Melampiri surat keterangan berbadan sehat dari dokter
4. Melampiri surat keterangan jenjang pendidikan terakhir/Ijazah
5. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
6. Memiliki NPWP

Bagi yang berminat dapat menyampaikan berkas usulan/permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup, paling lambat tanggal 10 Mei 2017 ke alamat E-mail: taus.pklk.dikdasmen@gmail.com atau ke alamat:

Direktorat pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen
u.p. Sub Bagian Tata Usaha
Kompleks Kemdikbud Cipete, Gedung D lantai 2
Jalan RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan



Direktor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dr. Rahmat Rakhmawan S, S.Pd, MM
NIP. 19630301031987031002

Tembusan:

Yth. Direktur Pembinaan PKLK

PETA JALAN REVITALISASI PENDIDIKAN KEMANDIRIAN/VOKASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

A. Pengantar

Penyandang disabilitas merupakan salah satu anggota masyarakat yang paling rentan menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Penyandang disabilitas dianggap tidak produktif, perlu dikasihani, diasingkan, dan dikucilkan. Penyandang disabilitas ada tetapi dianggap tidak ada, penyandang disabilitas diperhitungkan tidak berperan dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Penyandang disabilitas kurang memiliki tempat dalam berbagai bidang pembangunan bangsa, termasuk di bidang kerja.

Secara konstitusional penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera dengan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi; bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 nomor (1) menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Hal ini dikuatkan dengan pasal 45 yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Jaminan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja ditegaskan pada pasal 53 yang menuliskan bahwa (1) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Di forum internasional, pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin menguat. Organisasi internasional, *International Labour Organisation* (ILO) secara aktif mengangkat isu dunia kerja bagi penyandang disabilitas. ILO memiliki komitmen untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas sebagaimana kegiatan Konvensi ILO No. 111 tentang

Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi ILO ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21/1999.

Presiden Joko Widodo melalui sembilan agenda prioritas pemerintah (*Nawacita*) menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, yang dimanifestasikan melalui Nawa Kerja. Menteri Ketenagakerjaan dengan aksi afirmatif untuk mengurangi efek diskriminasi dan ketidakseimbangan atas suatu kondisi terhadap golongan tertentu/kaum minoritas. Menurut Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Wujud dari komitmen tersebut yaitu ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Penempatan dan Pelatihan Kerja bagi penyandang disabilitas di BUMN pada Desember 2015 tahun lalu. Dengan memberikan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas. *World Disability Report*, WHO (2011) menegaskan bahwa hal itu diharapkan dapat memutus rantai disabilitas dan kemiskinan.

Revitalisasi pendidikan kejuruan pada pendidikan khusus diwadahi dalam program kemandirian. Pada tulisan ini penggunaan istilah penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dituliskan secara bergantian sesuai konteks bahasan. Penyandang disabilitas digunakan dalam konteks yang lebih luas, sedang ABK, dan PDBK digunakan dalam konteks persekolahan.

B. Program Kemandirian pada Pendidikan Khusus

Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal.

Pendidikan ABK diselenggarakan melalui pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus disediakan bagi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), hambatan intelektual (tunagrahita), tunadaksa dan autisme. Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan secara terpisah dengan anak normal. Pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah umum di mana ABK belajar bersama dengan anak normal dan sekolah mengakomodasi semua kebutuhan anak dengan berbagai keragaman.

Secara intelektual, ABK dibagi menjadi dua yakni ABK tanpa hambatan intelektual dan ABK dengan hambatan intelektual. Seringkali dikonsepsikan bahwa ABK yang bersekolah di SLB adalah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan hambatan intelektual. Secara faktual, PDBK yang bersekolah di SLB memiliki kondisi yang sangat variatif, ada yang tanpa hambatan intelektual dan ada yang memiliki hambatan intelektual. PDBK yang belajar di sekolah umum menggunakan kurikulum umum dan atau modifikasi, sedang PDBK yang bersekolah di sekolah khusus menggunakan kurikulum khusus. ABK yang tanpa hambatan intelektual berada di sekolah khusus, menggunakan kurikulum khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus, kurikulum program kemandirian/vokasional menjadi prioritas utama dengan perbandingan 33% akademik dan 67% vokasional. Pembelajaran keterampilan dan kerja (program kemandirian) merupakan bagian penting dalam kehidupan PDBK setelah tamat sehingga dapat digunakan untuk bekerja dan hidup mandiri.

PDBK di SMALB yang memiliki kemampuan rendah, misalnya anak autisme berat, tunanetra dengan hambatan intelektual berat, CP (*Cerebral palsy*), dan tunagrahita dimana anak tersebut memiliki IQ di bawah 70 perlu mendapatkan perhatian khusus, karena tidak mungkin diberikan pendidikan vokasional tingkat tinggi. Jangankan untuk bekerja, untuk aktivitas hidup sehari-hari saja sangat tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, program kemandirian ABK dengan kondisi berat lebih tepat dengan memberikan keterampilan sederhana.

PDBK di SLB dengan kondisi berat, diberikan pelatihan kerja di *sheltered workshop* dimana fokus program kemandirian anak mengarah pada pekerjaan yang sangat sederhana dan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Contoh; bentuk keterampilan sederhana bagi anak tunagrahita berat yakni mencuci motor, merawat taman, dan *cleaning service*. Pada kerja cuci motor, anak tunagrahita berat hanya dapat melakukan kerja mengelap motor, jadi PDBK hanya mengerjakan satu bagian dari keterampilan kerja dari keseluruhan. Demikian juga dengan merawat taman, anak tunagrahita hanya dapat melakukan kerja mencabut rumput, pekerjaan inipun terkadang masih membutuhkan pendampingan orang dewasa.

1. Data Base Sekolah Luar Biasa

Data pokok pendidikan (dapodik) bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa jumlah satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) sebanyak 2.059 sekolah, dengan PDBK sejumlah 118.846 orang.



Program kemandirian diberikan kepada peserta didik pada SMALB. Keberadaan SMALB ada yang berdiri sendiri dan atau satu atap dengan SDLB dan SMPLB (SLB). Jumlah SMALB tahun 2016 sebanyak 1091 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.688 dari berbagai ketunaan.

Terkait dengan lulusan sekolah khusus jenjang SMALB pada 3 tahun terakhir (2013-2015) di dua propinsi yakni wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni penyandang disabilitas yang bekerja di Instansi dan bekerja wirausaha atau mandiri. Sebanyak 31 ABK lulusan SMALB diterima bekerja di instansi sebagai *office boy*, karyawan toko, klinik kecantikan, *laundry*, penjahit, karyawan batik, buruh pabrik, pekerja pembuat bulu mata, bangunan, bengkel, sales motor, percetakan/sablon, warung makan, dan asisten guru. Sedang 26 ABK lulusan SMALB dapat bekerja secara mandiri/wiraswasta yakni konveksi, wirausaha ternak, *massage* (pijat), pedagang asongan, bengkel sepeda, cuci motor, pramusaji, asisten tukang bangunan, penjual bakso, pedagang, asisten rumah tangga, memproduksi kue, tambal ban, buruh becak, dan jasa kebersihan. Data ini membuktikan bahwa bila PDBK dilatih dan diberikan kesempatan maka lulusan SMALB dapat bekerja untuk kepentingan hidup sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakatnya.

2. Data Angkatan Kerja Disabilitas

Berdasarkan sumber data dan informasi disabilitas angkatan kerja, Kemenakertrans tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk disabilitas sebagai angkatan kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

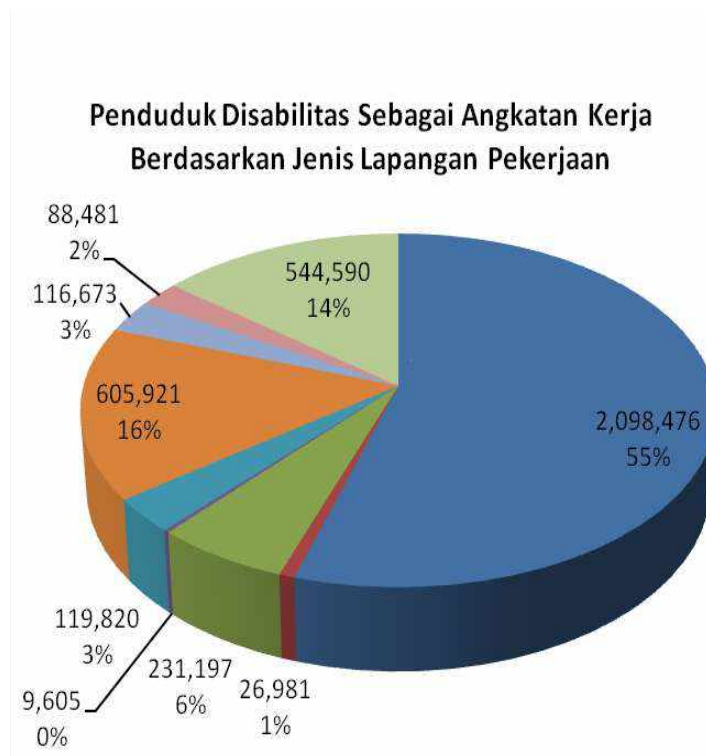


Diagram atas dapat dijelaskan bahwa penyandang disabilitas yang bekerja pada bidang pertanian sekitar 2.098.478 (55%), bidang jasa 544.590 (14%), perdagangan, hotel dan rumah makan (16%), industri (6%) dan sisanya bidang pertambangan, listrik, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sangat bervariasi dan sangat terbuka untuk berbagai jenis profesi.

3. Jenis Keterampilan

Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada hakekatnya untuk membantu anak mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar menjadi mandiri. Program kemandirian pada jenjang SMALB, PDBK dapat mengembangkan potensinya dengan memilih keterampilan sesuai minat dan bakat maksimal 2 peminatan. Adapun program kemandirian di SMALB adalah:

- a. Tata boga,
- b. Tata busana,
- c. Tata kecantikan,
- d. Pijat (*massage*),
- e. Tata graha,
- f. Teknik informatika dan computer,
- g. Teknik penyiaran radio,
- h. Perbengkelan motor,
- i. Seni musik,
- j. Seni tari,
- k. Seni lukis,
- l. Cetak saring/sablon,
- m. Suvenir,
- n. Seni membatik,
- o. Desain grafis,
- p. Fotografi,
- q. Elektronika alat rumah tangga,
- r. Budidaya perikanan,
- s. Budidaya peternakan,
- t. Budidaya tanaman,

Satuan pendidikan dapat mengembangkan pilihan kemandirian sesuai dengan potensi daerah, karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda.

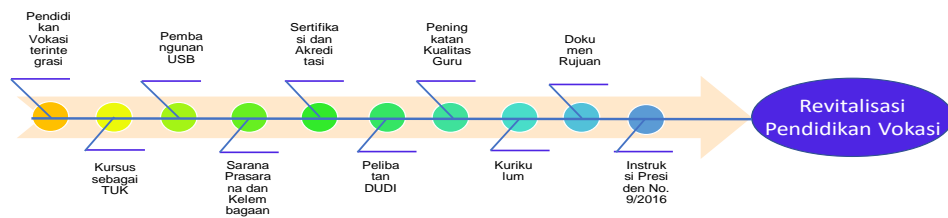
Selain mengikuti pembelajaran secara terstruktur peserta didik juga melaksanakan program magang pada semester I Kelas XII selama 1-2 bulan. Kegiatan magang pada program kemandirian di satuan pendidikan khusus dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung, belajar beradaptasi, menerapkan pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga dapat hidup mandiri dan produktif. Kegiatan magang dapat dimulai dengan pembelajaran bersama dengan dunia industri sehingga dapat dilakukan pada kelas X dan XI. Kegiatan belajar bersama DUDI (*dual system*) memberikan makna bahwa materi (teori) diberikan dalam satu aktivitas magang, tidak terpisah (*blended*).

Program kemandirian SMALB belum terlaksana sesuai harapan, karena beberapa kendala dalam pelaksanaan, antara lain :

- a. Belum semua sekolah memiliki sarana dan prasarana keterampilan yang memadai,
- b. Sebagian besar pendidik di sekolah khusus belum memiliki kompetensi bidang keterampilan dan atau pendidik yang berlatar belakang pendidikan keterampilan,
- c. Belum semua sekolah memiliki mitra usaha yang dapat digunakan sebagai partner dalam pengembangan program kemandirian/keterampilan,
- d. Pandangan masyarakat bahwa PDBK menambah beban dan merepotkan.

4. Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan/Vokasi

Kemdikbud mengeluarkan sepuluh program revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan yang menjadi acuan dalam merencanakan atau membuat peta jalan pendidikan kemandirian/vokasi di SMALB. Sepuluh program tersebut adalah (1) penerbitan Inpres nomor 9/2016, (2) pembuatan dokumen rujukan, (3) penyelarasan kurikulum, (4) penyediaan dan peningkatan kualitas guru, (5) peningkatan pelibatan dunia usaha dunia industri/DUDI, (6) meningkatkan sertifikasi dan akreditasi, (7) sarana prasaran dan kelembagaan, (8) peningkatan pembangunan unit sekolah baru/USB, (9) membentuk kursus sebagai tempat uji kompetensi, dan (10) pendidikan vokasi terintegrasi SMALB-SMK-DUDI.



5. Faktor Internal Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan/Vokasi

Program revitalisasi pendidikan kejuruan/vokasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah aspek pendidikan yang berasal dari dalam lembaga yang mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan program pendidikan kejuruan. Faktor eksternal adalah aspek pendidikan yang berasal dari luar lembaga yang mempunyai sinergi dengan dunia pendidikan.

Faktor internal yang mempunyai pengaruh kuat dalam program revitalisasi pendidikan kejuruan/vokasi, adalah; (1) kurikulum, (2) peningkatan kualitas pendidik, (3) sarana prasarana, dan (4) *networking* (kerjasama) dengan DUDI. Berikut bagan faktor internal yang perlu diperhatikan dalam revitalisasi pendidikan kejuruan/vokasi.



C. Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Kemandirian/Vokasi

Berdasarkan beberapa aspek di atas, disusunlah peta jalan revitalisasi pendidikan kemandirian/vokasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2016-2020 sebagai tergambar pada bagan di bawah.



Uraian program pengembangan pendidikan kemandirian/vokasi yang terdiri dari jenis kegiatan, sasaran/target, durasi kegiatan, dan penjelasan lain, yang terdistribusi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terpapar pada tabel di bawah.

**Rincian Program Revitalisasi Pendidikan Kemandirian SMALB
Tahun 2017-2020**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASA RAN	TARGET CAPAIAN PERTAHUN			
				2017	2018	2019	2020
3.	Program Revitalisasi Pendidikan Keterampilan (Dasar-dasar Pendidikan Vokasi)	a. Pembuatan dokumen rujukan.					
		1) Penyusunan/penyempurnaan peta jalan revitalisasi pendidikan keterampilan (FGD/3 keg/3 hari/15 org.)	6 nskh	1 nsh	2 nskh	3 nskh	
		2) Penyusunan kajian tentang pengembangan pendidikan keterampilan/vokasi berdasarkan tantangan jaman (FGD/3 keg/3 hari/ 15 org)	4 nskh	1 nskh	1 nskh	1 nskh	1 nskh
		3) Penyusunan/penyempurnaan konsep pendidikan keterampilan sebagai dasar pendidikan vokasi (FGD/3 keg/3 hr/15 org)	15 nskh		5 nskh	5 nskh	5 nskh
		4) Penyusunan dokumen pedoman (juklak/juknis) pendididkan keterampilan (FGD/3 keg/3 hari/15 org)	15 nskh		5 nskh	5 nskh	5 nskh
		b. Penyelarasan kurikulum					
		1) <i>Overview</i> /reorientasi perangkat kurikulum program pendidikan keterampilan (FGD/3 keg/ 5 hari/20 org)	21 nskh		7 nskh	7 nskh	7 nskg
		2) Penyelarasan jenis keterampilan SMA LB dengan SKKNI dan DUDI (<i>workshop</i> /3 keg/4 hari/60 org)	5 dok		1 nskh	2 nskh	2 nskh
		3) Review kajian mata pelajaran dan kajian implementasi (<i>workshop</i> /3 keg/4 hari/50 org)	3 dok		1 nskh	1 nskh	1 nskh
		4) Penyusunan panduan praktis cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu (<i>worshop</i> /3 keg/4 hari/25 org)	3 nskh		1 nskh	1 nskh	1 nskh
		c. Penyediaan dan peningkatan kualitas guru					

		1) Penyusunan model pembelajaran pendidikan keterampilan (<i>workshop</i> /10 hari)	450 guru		150 guru	150 guru	150 guru
		2) Bimbingan teknis teknisi bengkel/laboratorium (<i>workshop</i> /10 hari)	500 tknisi		150 teknisi	200 teknisi	150 teknisi
		3) Magang guru keterampilan di DUDI (14 hari)	450 guru		150 guru	150 guru	150 guru
		4) Bimtek Peningkatan Mutu Pembelajaran Keterampilan SMALB (<i>workshop</i> /10 hari)	900 guru		300 guru	300 guru	300 guru
	d. Peningkatan pelibatan DUDI	1) Peningkatan kerjasama dengan SMK, DUDI, dan Instansi relevan (MoU)	400 instansi		100 instnsi	150 instnsi	150 instnsi
		2) Peningkatan kerjasama dengan industri, asosiasi profesi, UKM (<i>workshop</i> /3 hr/15 org)	3 dok		1 dok	1 dok	1 dok
		3) Kolaborasi PBM dengan industri, asosiasi profesi, UKM (magang/PBM/1 sem/10 peserta)	450 sek		150 sek	150 sek	150 sek
		4) Peningkatan kompetensi peserta didik ke DUDI (magang/30 hari)	1.200 psrt didik		400 psrt didik	400 psrt didik	400 psrt didik
	e. Meningkatkan sertifikasi dan akreditasi	1) Uji kompetensi dan sertifikasi keterampilan guru SMALB	750 guru		250 guru	250 guru	250 guru
		2) Akreditasi SMA LB	450 sek		150 sek	150 sek	150 sek
		3) Sertifikasi peserta didik	1.200 psrt didik		400 Psrt didik	400 psrt didik	400 psrt didik
	f. Peningkatan sarana prasarana dan kelembagaan	1) Pembangunan/rehabilitasi ruang bengkel atau laboratorium keterampilan	250 sekolah		50 sek	100 sek	100 sek
		2) Pengadaan paket peralatan bengkel atau laboratorium terpadu	250 pkt		50 paket	100 pkt	100 pkt
		3) Pengadaan perangkat pembelajaran (fasilitas IT PBM)	250 pkt		50 paket	100 pkt	100 pkt
		4) Pembangunan/rehabilitasi ruang pameran hasil karya peserta didik.	250 pkt		50 paket	100 pkt	100 pkt
	g. Peningkatan pembangunan USB SLB	1) Pembangunan USB SMA LB	5 USB		1 USB	2 USB	2 USB
		2) Pembangunan SMA LB Model	2 USB			1 USB	1 USB

	h. Pembentukan sekolah sebagai tempat uji kompetensi (TUK)					
	1) Kajian konsep dan lokasi sekolah sebagai TUK (<i>workshop</i> /3 hari/30 psrt)	1 konsep		1 knsep		
	2) Penyiapan Perangkat Ujian Mata Pelajaran Keterampilan SMALB (<i>workshop</i> /3 hari/3 kali/30 peserta)	1 dok		1 dok		
	3) Uji kompetensi asesor (<i>workshop</i> /10 hari/uji asesor)	270 guru		70 guru	100 guru	100 guru
	4) Pembentukan sekolah sebagai TUK	100 sekolah			50 sek	50 sek
	i. Pendidikan keterampilan (vokasi) terintegrasi (SMALB-SMK-DUDI)					
	1) Penyusunan/penyempurnan perangkat rintisan model pendidikan keterampilan (FGD/3 putaran/3 hari/15 psrta)	2 dok	1 dok	1 dok		
	2) Uji coba dan implementasi pendidikan keterampilan terintegrasi	140 sekolah	5 sek	35 sek	50 sek	50 sek
	3) Pendampingan implementasi pendidikan keterampilan (Tim/5 hari/3 org)	140 sekolah	5 sek	35 sek	50 sek	50 sek
	4) Rintisan sekolah rujukan pendidikan keterampilan	2 sekolah			1 sek	1 sek
	5) Bimtek pengembangan sekolah rujukan pendidikan keterampilan	3 keg		1 keg	1 Keg	1 Keg
	6) Supervisi Implementasi rintisan sekolah rujukan pendidikan keterampilan	2 keg			1 keg	1 keg

Catatan: Program revitalisasi belum menyentuh/termasuk pendidikan keterampilan di jenjang SD dan SMP.

D. Penutup

Peta jalan revitalisasi pendidikan kemandirian/vokasional di SMALB disusun berdasarkan aspek internal, aspek eksternal, dan kebijakan Kemdibud. Peta jalan revitalisasi pendidikan kemandirian/vokasional sebagai acuan pelaksanaan program kerja tahunan Direktorat Pembinaan PKLK dengan mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Diharapkan dengan disusunnya Peta jalan revitalisasi pendidikan kemandirian/vokasional, target dan tujuan pendidikan bagi ABK dapat tercapai dan tamatan SMALB mempunyai kompetensi, handal bekerja, dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia lain dalam pekerjaan, inivasi, kreativitas, dan kemandirian.